



Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Hukum

SURAT KETERANGAN

No.:167/UKI.F4.D/SDM.6.1/2020

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Aartje Tehupeiori, S.H.,M.H
NIDN : 0314086404

Adalah benar Staf Pendidik Fakultas Hukum yang membimbing skripsi mahasiswa pada semester ganjil 2019/2020, adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Judul Skripsi	Keterangan
01	Jonathan Arief	1540050084	Analisis Yuridis Dalam Upaya Penyelesaian Sertifikat Ganda	Pembimbing Utama
02	Clara Hukom	1640050028	Akibat Hukum Jaminan Hak Atas Tanah Terhadap Kasus Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Jth	Pembimbing Utama

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, oleh karena surat tugas membimbing skripsi tersebut diatas tidak diterbitkan.

Jakarta, 12 Oktober 2020
Dekan,



Hidman Panjaitan, S.H., MH
NIP UKI.



Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Hukum

SURAT KETERANGAN
No.:168/UKI.F4.D/SDM.6.1/2020

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Aartje Tehupeiry, S.H.,M.H
NIDN : 0314086404

Adalah benar Staf Pendidik Fakultas Hukum yang membimbing skripsi mahasiswa pada semester ganjil 2019/2020, adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Judul Skripsi	Keterangan
01	Maria Kristina Ule	1640050007	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggung Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan No.1217 K/PDT/2016)	Pembimbing Kedua
02	Chandra Siregar	1640050089	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat	Pembimbing Kedua
03	Dian Risky Bastanta	1640050111	Pembatalan Terhadap Sertifikat Ganda (Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 3615 K/pdt/2015)	Pembimbing Kedua

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, oleh karena surat tugas membimbing skripsi tersebut diatas tidak diterbitkan.

Jakarta, 12 Oktober 2020

Dekan,



Hulman Panjaitan, S.H., MH
NIP. UKI.



Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Hukum

SURAT KETERANGAN

No.: 169/UKI.F4.D/SDM.6.1/2020

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Aartje Tehupeiori, S.H.,M.H
NIDN : 0314086404

Adalah benar Staf Pendidik Fakultas Hukum yang membimbing skripsi mahasiswa pada semester ganjil 2018/2019, adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Judul Skripsi	Keterangan
01	Roby Silangit	1540050033	Analisis Yuridis Tentang Ganti Rugi Hak Atas Tanah di Desa Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Pembimbing Kedua
02	Anathasia Lestari	1540050051	Proses Peningkatan Status Tanah Garapan Kepada Status Hak Miliki Atas Tanah	Pembimbing Kedua
03	Bunga Siti Aisyah Husni	1540050073	Analisa Hukum Tentang Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit di Bank Mandiri	Pembimbing Kedua

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, oleh karena surat tugas membimbing skripsi tersebut diatas tidak diterbitkan.

Jakarta, 12 Oktober 2020


Hulman Panjaitan, S.H., MH
NIP UKI.



Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Hukum

SURAT KETERANGAN
No.: 170/UKI.F4.D/SDM.6.1/2020

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Aartje Tehupeior, S.H.,M.H
NIDN : 0314086404

Adalah benar Staf Pendidik Fakultas Hukum yang membimbing skripsi mahasiswa pada semester genap 2017/2018, adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Judul Skripsi	Keterangan
01	David Parlindungan Hutahaean	1440050038	Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 255/B/2010/PT.TUN.JKT Tentang Peruntukan Mendirikan Rumah Ibadah	Pembimbing Kedua
02	Putu Ayu Yuliani Fajar Satyawati	1440050068	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia	Pembimbing Kedua
03	Bunga Siti Aisyah Husni	1540050073	Analisa Hukum Tentang Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit di Bank Mandiri	Pembimbing Kedua

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, oleh karena surat tugas membimbing skripsi tersebut diatas tidak diterbitkan.

Jakarta, 12 Oktober 2020

Dekan,



Hulman Panjaitan, S.H., MH
NIP UKI.

**ANALISIS YURIDIS DALAM UPAYA
PENYELESAIAN SERTIPIKAT GANDA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



JONATHAN ARIEF

1540050084

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG
ANALISIS YURIDIS DALAM UPAYA
PENYELESAIAN SERTIPIKAT GANDA

PESERTA UJIAN

Jonathan Arief

1540050084

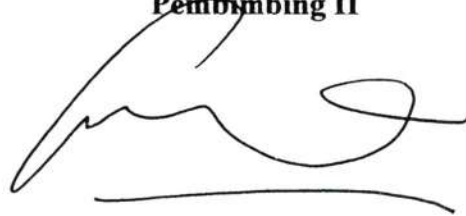
Disetujui,

Pembimbing I



Dr. Aartje Tehupeior, SH., MH.

Pembimbing II



Edward M.L Panjaitan, SH., LL.M.

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara



I Dewa Ayu Widyani, SH., MH.

**AKIBAT HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH
TERHADAP KASUS PUTUSAN NOMOR 4/Pdt.G/2019/PN Jth**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
derajat strata satu pada Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh: Clara Hukom

(16 400 500 28)

FALKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

TAHUN 2019/2020

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

**Akibat Hukum Jaminan Ha Katas Tanah Terhadap Kasus Putusan Nomor
: 4/Pdt.G/2019/PN Jth**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata
satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Peserta Ujian

Nama : Clara Hukom
NIM : 1640050028

Disetujui,

Pembimbing I



(Dr. Aartje Tehupeiory S.H., M.H)

Pembimbing II




(Chandra Aritonang, SH., M.H)

Mengetahui,

Ketua Kekhususan Hukum Administrasi Negara




(I Dewa Widyani S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN ATAS TANAH MILIK PIHAK KETIGA
DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN NO
1217 K/PDT/2016)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Maria Kristina Ule

1640050007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

Peserta Ujian

Nama : Maria Kristina Ule

NIM : 1640050007

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit

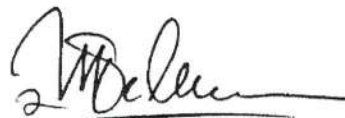
Disetujui,

Pembimbing I



(I Dewa Ayu Widyani SH,MH)

Pembimbing II



(Dr, Artje Tehupieory SH,MH.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Perdata



(Krisus Sitanggang SH,.MH)

ABSTRAK

- A. Nama : Maria Kristina Ule
B. Nim : 1640050007
C. Program Kekhususan : Hukum Perdata
D. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit
E. Halaman : 87 halaman
F. Kata Kunci : Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit
G. Ringkasan Isi

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit. Bank dalam memberikan kredit bagi kepada debitur harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi masalah yang akan merugikan pihak kreditur tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana kedudukan pemegang hak tanggungan atas tanah milik pihak ketiga dalam perjanjian kredit dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan atas tanah milik pihak ketiga berdasarkan putusan Nomor 1217 K/pdt/2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan dalam perjanjian kredit. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara kepustakaan dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang lebih diutamakan pada kreditur pemegang hak tanggungan serta memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan.

- H. Daftar Acuan : 29 Buku + 7 Internet + 5 Undang-Undang
I. Dosen Pembimbing :
1. Dosen Pembimbing I : I Dewa Ayu Widyani, SH,MH
2. Dosen Pembimbing II : Dr. Aartje Tehupeiory, SH,MH

Penulis

(Maria Kristina Ule)

ABSTRACT

- A. Name : Maria Kristina Ule
B. NIM : 1640050007
C. Program Specificity : Civil Law
D. Title : Legal Protection of Dependents on Third Party Owned
Land in the Credit Agreement
E. Pages : 87 pages
F. Keywords : Mortgage Rights in a Credit Agreement

G. Summary of Contents

Dependents are collateral rights which are imposed on land rights as referred to in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. Economic and trade developments followed by developments in the need for credit and the provision of credit facilities require guarantees for the security of credit. Banks in providing credit to debtors must pay attention to the principle of prudence so that problems do not occur that will harm the creditor. In this study there are two formulations of the problem to be discussed namely how the position of the holders of mortgage rights on land owned by third parties in the credit agreement and how the form of legal protection for holders of mortgage rights on land owned by third parties based on decision Number 1217 K / pdt / 2016.

The method used in this research is normative juridical method. Juridical research is used to analyze various laws and regulations that contain provisions regarding matters relating to legal protection for holders of mortgage rights in credit agreements. In this study the data obtained by means of literature and data sources used are secondary data. In Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights gives a more priority position to the creditor holders of the mortgage rights and provides legal protection for the creditor holders of the mortgage rights.

H. Reference List: 29 Books + 7 Internet + 5 Laws

I. Counseling Lecturer:

1. Supervisor I : I Dewa Ayu Widyani, SH, MH
2. Supervisor II : Dr. Aartje Tehupeiory, SH, MH

Author

(Maria Kristina
Ule)

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

Nama : Chandra Siregar

Nim : 16.400.500.89

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

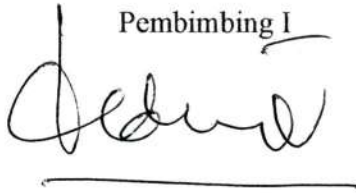
Chandra Siregar

16.400.500.89

**PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DARI TANAH
ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Disetujui,

Pembimbing I



(I Dewa Ayu Widyani, SH., MH)

Pembimbing II



(Dr. Aartje Tehupeiry, SH., MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan



(I Dewa Ayu Widyani, SH., MH)

**PEMBATALAN TERHADAP SERTIFIKAT GANDA
(Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 3615 K/Pdt/2015)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh :

Nama : Dian Risky Bastanta

NIM : 16.400.501.11

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Dian Risky Bastanta

NIM : 1640050111

**PEMBATALAN TERHADAP SERTIFIKAT GANDA
(Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 3615 K/Pdt/2015)**

Disetujui,

Pembimbing I



(I Dewa Ayu Widyani, S.H.,M.H)

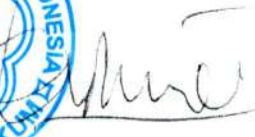
Pembimbing II



(Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara



(I Dewa Ayu Widyani, S.H.,M.H)

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Dian Risky Bastanta
B. Nomor Induk Mahasiswa : 16.400.501.11
C. Judul Skripsi : PEMBATALAN TERHADAP SERTIFIKAT GANDA (Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 3615 K/Pdt/2015)
D. Program Kekhususan : Hukum Perdata
E. Jumlah Halaman : x + 82 halaman
F. Daftar Bacaan : Buku, Internet, Undang-Undang
G. Dosen Pembimbing : 1. I Dewa Ayu Widyani, S.H.,M.H
2. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H
H. Kata Kunci : Sertifikat ganda,
I. Ringkasan Isi :

Sertifikat ganda adalah suatu kondisi sebidang tanah yang memiliki dua sertifikat dan masing-masing sertifikat dimiliki oleh dua orang yang berbeda yang secara resmi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengembangkan tentang pemahaman tentang apa saja penyebab terjadinya sertifikat ganda dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap sertifikat ganda. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kasus yuridis normatif.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis lagi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3615 K/Pdt/2015 untuk mengetahui apa penyebab terjadinya sertifikat ganda dan bentuk penyelesaian terhadap sengketa sertifikat ganda hak atas tanah. Teori yang penulis gunakan dalam menganalisis kasus tersebut adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya Sertifikat Ganda adalah 1. Adanya kesalahan dari salah satu pemilik tanah itu sendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik serta adanya kesengajaan salah satu dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis yang dalam hal ini kesalahan tersebut dalam bentuk kekeliruan pengukuran dan pemetaan obyek; selain itu, juga dikarenakan belum adanya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh di daerah obyek tanah tersebut; dan yang terakhir adalah karena domisili salah satu atau beberapa pihak yang berkepentingan berada di luar kota serta semakin melemahnya asas publisitas 2. segala upaya yang telah dilakukan telah sesuai pada prosedurnya. Mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi yaitu Mahkamah Agung. Namun untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memenuhi asas publisitas, maka pihak yang tidak dapat menerima hasil putusan tersebut bisa melakukan pengujian ke Komisi Informasi Pusat agar mendapat informasi yang jelas.

ABSTRACT

- A. Student Name : Dian Risky Bastanta
B. Student Identification Number : 16.400.501.11
C. Thesis Title : CANCELLATION OF CERTIFICATE
MULTIPLE (Case: Decision of the Supreme
Court Number 3615 K / Pdt / 2015)
D. Program Specificity : Civil Law
E. Number of Pages : x + 82 pages
F. Reading List : Books, Internet, Laws
G. Supervisor : 1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H
2. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H
H. Keywords : Double certificate,
I. Summary of Content:

A double certificate is a condition of a piece of land that has two certificates and each certificate is owned by two different people which are officially issued by the National Land Agency (BPN). This study aims to find out, understand and develop an understanding of what causes multiple certificates and how to resolve multiple certificates. To achieve these objectives the researchers used a normative juridical case approach.

The data obtained from the results of the study were analyzed again based on the decision of the Supreme Court No. 3615 K / Pdt / 2015 to find out what caused the dual certificate and the form of resolution of the dispute over the right to land. The theory that the author uses in analyzing the case is the theory of legal certainty and the theory of legal justice.

The results showed that the cause of the Double Certificate was 1. There was an error from one of the landowners themselves who did not make good use of their land and the intent of one of the landowners to re-register a certificate that actually already existed. Furthermore, errors from the Land Office of the City of Kefamenanu, North Central Timor Regency, namely in the collection and processing of physical data and juridical data, in this case the errors in the form of measurement errors and mapping of objects; in addition, it is also due to the absence of a comprehensive map of land registration in the area of the object of land; and the last is because the domicile of one or several interested parties is outside the city and the weakening of the principle of publicity 2. all efforts that have been made have been according to the procedure. Starting from the level of the District Court, the High Court, to the Cassation namely the Great Mahmakah. However, to find out whether the decision has fulfilled the principle of publicity, those who cannot accept the results of the decision can test the Central Information Commission in order to obtain clear information.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG GANTI RUGI HAK
ATAS TANAH DI DESA ULEE LHEUE KECAMATAN
MEURAXA KOTA BANDA ACEH**

(Analisa Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3428 k/Pdt/2017)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas

Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

Nama : Roby Silangit

NIM : 1540050033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2019

HALAMAN PERSELENGKAPAN SIDANG

ANALISIS YURIDIS TENTANG GANTI RUGI HAK ATAS
TANAH DI DESA ULEU LHEUE KECAMATAN MEURAXA
KOTA BANDA ACEH

(Analisa Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3428 k/Pdt/2017)

Peserta Ujian

Nama : Ruby Silangit

NIM : 1540050033

Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* oleh Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Korupsi

Disetujui,

Pembimbing I

(D) Dewa Ayu Widiyanti, S.H., M.H.

Pembimbing II

(D) Arta Indrawati, S.H., M.H.

Tengetahui,

Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara



(D) Dewa Ayu Widiyanti, S.H., M.H.

ABSTRAK

- (a) Nama : Roby Silangit
NIM : 1540050033
- (b) Judul : ANALISIS YURIDIS TENTANG GANTI KERUGIAN
ATAS TANAH DI DESA ULEE LHEUE
KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH
(Analisa Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 k/
Pdt/2017).
- (c) IV, 92 Hlm.
- (d) Kata Kunci : Kasus Ganti kerugian Pengadaan Tanah Di Desa Ulee
Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.
- (e) Tanah adalah modal pembangunan, yang akan menjadi salah satu unsur menjadikan bangsa Indonesia maju dan dapat bersaing di kancan internasional. Tanah harus digunakan dan dimanfaatkan seutuhnya, sehingga Negara mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai organisasi terbesar dalam suatu bangsa yang bertanggung jawab, sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan luas tanah yang cukup banyak, dengan kurangnya tanah yang dikuasai oleh pemerintah, pemerintah melakukan pengadaan tanah yaitu peralihan hak atas tanah dari milik pribadi ke pemerintah atau negara. Pengadaan tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai acuan dalam melakukan pengadaan tanah. Peralihan hak atas tanah dari milik pribadi ke pemerintah dilakukan dengan cara ganti kerugian. Ganti kerugian haruslah sesuai dengan keadilan dan membuat masyarakat menjadi sejahtera bukan malah kebalikannya, Ganti kerugian yang dilakukan harus tepat pada orang yang memiliki tanah tersebut sehingga kasus seperti pengadaan tanah di Desa Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh ini tidak terjadi lagi.
- (f) Buku Acuan : 20 (1977-2019)
- (g) Dosen Pembimbing I (I Dewa Ayu Widyani, SH.,MH)
Dosen Pembimbing II (Dr. Aartje Tehupeiory, SH.,MH)

ABSTRACT

- (a) Name : Roby Silangit
NIM : 1540050033
- (b) Title : ANALISIS YURIDIS TENTANG GANTI KERUGIAN
ATAS TANAH DI DESA ULEE LHEUE
KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH
(Analisa Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 k/
Pdt/2017).
- (c) IV, 92 p
- (d) Keyword : Kasus Ganti kerugian Pengadaan Tanah Di Desa Ulee
Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.
- (e) Land is the capital of development, which will become one of the elements to make the Indonesian nation progress and can compete in the international arena. Land must be used and fully utilized, so that the State has the ability to carry out its rights and obligations as the largest organization in a nation that is responsible, in accordance with Pancasila and Undang-Undang 1945. Development carried out by the government uses a considerable amount of land, with the lack of land controlled by the government, the government procures land, namely the transfer of land rights from private property to the government or the state. Land acquisition is regulated in Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. The transfer of land rights from private property to the government is carried out by means of compensation. Compensation must be in accordance with justice and make the community prosperous rather than the opposite, the compensation that is done must be right on the person who owns the land so that cases such as land acquisition in Ulee Lheue Village, Meuraxa Sub-District, Banda Aceh City do not happen again.
- (f) Reference book : 20 (1977-2019)
- (g) Lecturer I (I Dewa Ayu Widyani, SH.,MH)
Lecturer II (Dr. Aartje Tehupeiory, SH.,MH)

**PROSES PENINGKATAN STATUS TANAH GARAPAN KEPADA
STATUS HAK MILIK ATAS TANAH**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :
Anathasia Lestari
1540050051

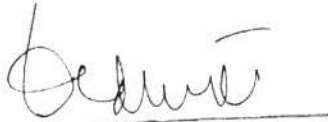
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG
PENULISAN HUKUM**

NAMA : Anathasia Lestari
NIM : 15.400.500.51
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul : **PROSES PENINGKATAN STATUS TANAH GARAPAN
KEPADA STATUS HAK MILIK ATAS TANAH**

Disetujui oleh

Pembimbing I



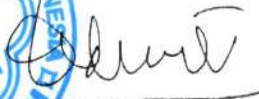
(I Dewa Ayu Widyani, SH., MH)

Pembimbing II



(Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H)

Kepala Bagian Program Kekhususan
Hukum Administrasi Negara



(I Dewa Ayu Widyani, SH., MH)

ABSTRAK

Nama : Anathasia Lestari
NIM : 15.400.500.51
Judul : Proses Peningkatan Status Tanah Garapan Kepada Status Hak Milik Atas Tanah
Jumlah halaman : i + 92 halaman
Dosen Pembimbing : 1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H
2. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Kata Kunci : Peningkatan, Tanah Garapan, Peralihan

Tanah garapan adalah sebidang tanah yang belum dilekati suatu hak dan dikerjakan atau diambil manfaatnya oleh pihak lain. Pihak lain ini dinamakan penggarap, dimana penggarap ini dengan persyaratan tertentu bisa memohonkan suatu hak atas tanah tersebut. Tanah garapan ini bisa juga dioperalihkan kepada pihak lain, dimana si penggarap pertama akan menerima ganti rugi terhadap tanah garapan yang dialihkan tersebut. Operalih ini harus dilakukan dengan akta notaris.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif atau metode kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah tidak secara tegas diatur dalam UUPA, namun dengan menggunakan penafsiran yang berdasarkan konsideran UUPA dan Pasal 5 UUPA makan pengertian jual beli tanah menurut UUPA tidak lain adalah pengertian jual beli tanah menurut hukum adat. Untuk meningkatkan statusnya, pemegang tanah garapan bisa memohonkan sertifikat hak atas tanah yang digarapnya. Dimana permohonan ini ditunjang dengan rencana peruntukan tanah di lokasi tersebut yang sering disebut Advis Planning Tata Ruang.

Jakarta, 14 Februari 2019

Penulis

Anathasia Lestari

ABSTRACT

Name : Anathasia Lestari
Student's Number : 1540050051
Title : The Process of Improving the Land
Status of the Proprietary to the Status
of Ownership of Land
Number of pages : I + 92 pages
Supervisor : 1. I Dewa Ayu Widayani, S.H., M.H
2. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H
Specific Study Program : State Administrative Law
Keywords : Improvement, Arable land, Transition

The cultivated land is land that has not been entrenched and it's done or taken advantage of by other parties. This other party is called a cultivator, in which the cultivator with certain conditions can apply for such rights. This cultivated land can also be transferred to another party, where the first cultivator will receive compensation for the transferred cultivated land, this transferred must be done with a notary deed.

This research method carried out in this paper is a normative juridical method. Normative juridical method used in legal research conducted by examining existing library materials.

The transfer of land rights through land sale and purchase is not explicit regulated in UUPA, but by using interpretations UUPA and article of 5 UUPA so the nation of buying and selling land according to the law is nothing but the nation by buying and selling land according to customary law. To improve it's status, holders of cultivated land can apply for a certificate of rights to the land they cultivated. Where this application is supported by the land alloymment plan in that location which is often called spatial advisory planning.

Jakarta, Februari 14th 2019

Penulis

Anathasia Lestari

**ANALISIS HUKUM TENTANG RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN
KREDIT DI BANK MANDIRI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1) pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

NAMA : Bunga Siti Aisyah Husni
NIM : 15.400.500.73
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2019

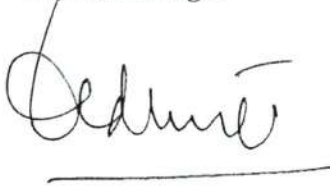
**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG
PESERTA UJIAN**

NAMA : Bunga Siti Aisyah Husni
NIM : 15.400.500.73
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

**ANALISIS HUKUM TENTANG RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN
KREDIT DI BANK MANDIRI**

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



(I Dewa Ayu Widyani, S.H., MH)

Pembimbing II



(Dr. Aartje Tehupeiry, S.H., M.H)

Kepala Bagian Program Kekhusuan

Hukum Administrasi Negara



(I Dewa Ayu Widyani, SH., MH.)

- A. Name : Bunga Siti Aisyah Husni
- B. student's numbers : 15.400.500.73
- C. Title : LEGAL ANALYSIS ABOUT FLAT HOUSE AS CREDIT GUARANTEE IN MANDIRI BANK
- D. supervisor : 1. I Dewa Ayu Widayani, S.H., MH
2. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H
- E. Specialty Program : State Administrative Law
- F. Reading list : Books, Journals, Internet, Constitution
- G. Number of pages : xi + 99 page
- H. Keywords : Flats, Credit Guarantee
- I. Summary of Contents :

ABSTRACT

Credit guarantees are very important in a credit agreement. Credit guarantees that use the apartment unit rights as a specific form that needs to be made in two agreements, namely a credit agreement as the main agreement and the Deed of Granting the Right as an agreement agreement. Through these two agreements, it can provide legal protection for Bank Mandiri as the lender and the owner of the apartment unit rights as the recipient of credit.

Writing this to understand the procedure of Flats as a guarantee of credit at Bank Mandiri and legal protection for holders of Flats that make the Flats as collateral at Bank Mandiri.

In writing this thesis, the author uses normative research methods, while the type of data used by the author is secondary data (literature) and primary data (through data) Bank Mandiri credit as a creditor must be careful because the Deed of giving the right to the mortgage can be made several credit guarantees so that they must be well researched, especially when conducting credit analysis involving collateral in the form of apartment units. Then this legal protection must be maintained so that the funds issued for guaranteed credit can be paid and the guarantee of the apartment units that are bound by credit cannot be transferred to other parties.

Jakarta, February 14, 2019
Author

Bunga Siti Aisyah Husni

- A. Nama : Bunga Siti Aisyah Husni
B. NIM : 15.400.500.73
C. Judul : ANALISIS HUKUM TENTANG RUMAH
SUSUN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI
BANK MANDIRI
D. Dosen Pembimbing : 1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., MH
2. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H
E. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
F. Daftar Bacaan : Buku, Jurnal, Internet, Undang-Undang
G. Jumlah Halaman : xi + 99 halaman
H. Kata kunci : Rumah Susun, Jaminan Kredit
I. Ringkasan Isi :

ABSTRAK

Jaminan kredit sangat penting dalam perjanjian kredit. Jaminan kredit yang menggunakan hak satuan rumah susun sebagai bentuk spesifik yang perlu dibuat dalam dua perjanjian yakni perjanjian kredit sebagai perjanjian utama dan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai perjanjian asosoir. Melalui dua perjanjian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi Bank Mandiri sebagai pemberi kredit dan pemilik hak satuan rumah susun sebagai penerima kredit.

Penulisan skripsi ini untuk memahami tata cara Rumah Susun sebagai jaminan kredit di Bank Mandiri dan perlindungan hukum bagi pemegang Rumah Susun yang menjadikan Rumah Susun nya sebagai jaminan di Bank Mandiri.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder (kepuustakaan) dan data primier (melalui data) Pemberian kredit Bank Mandiri sebagai kreditur harus berhati-hati karena Akta pemberian hak tanggungan dapat dijadikan beberapa jaminan kredit sehingga harus diteliti dengan baik, khususnya ketika melakukan analisis kredit yang menyangkut colateral berbentuk hak satuan rumah susun. Kemudian Perlindungan hukum ini harus dipertahankan agar dana yang dikeluarkan untuk kredit terjamin dapat dibayar dan jaminan satuan rumah susun yang terikat dengan kredit tidak bisa dipindahtanggankan kepada pihak lain.

Jakarta, 14 Februari 2019
Penulis

Bunga Siti Aisyah Husni

ANALISA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA JAKARTA NOMOR 255/B/2010/PT.TUN.JKT TENTANG
PERUNTUKAN MENDIRIKAN RUMAH IBADAH

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : David Parlindungan Hutahaean, S.Th

NIM : 14.400.570.38

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : David Parlindungan Hutahaean
NIM : 14.400.570.38
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 255/B/2010/
PT.TUN.JKT Tentang Peruntukan Mendirikan
Rumah Ibadah

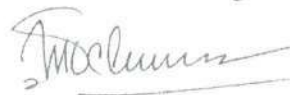
Disetujui,

Dosen Pembimbing I



(Dr. Dewa Ayu Widyarningsih, SH., MH)

Dosen Pembimbing II



(Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara



(Dr. Dewa Ayu Widyarningsih, SH., MH)

ABSTRAKSI

- A. Nama : David Parlindungan Hutahaeen
B. NIM : 14.400.570.38
C. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
D. Judul : Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 255/B/2010/PT.TUN.JKT Tentang Peruntukan Mendirikan Rumah Ibadah
E. Halaman : i-x – 89 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Mendirikan Rumah Ibadah
G. Ringkasan Isi :

Pada saat sedang berlangsung Ibadah Perayaan Natal Desember 2009, kelompok masyarakat intoleran memaksa membubarkan ibadah tersebut, dan untuk alasan menghindari konflik yang lebih luas maka Bupati Bekasi menyegel sebidang tanah tempat beribadah tersebut, yang telah digugat HKBP Filadelfia ke PTUN Bandung; melalui kajian penelitian terhadap permasalahan dalam Putusan PTTUN, dan analisa apakah Putusan PTTUN telah memberikan keadilan dalam Mendirikan Rumah Ibadah, bahwa sebagai penyebab buntutnya penyelesaian sengketa tersebut adalah karena Gereja HKBP Filadelfia belum memiliki Surat IMB; sehingga jika Bupati Bekasi mengeksekusi Putusan PTTUN Jakarta, maka kelompok masyarakat intoleran terus melakukan pemaksaan membubarkan ibadah dengan alasan Gereja HKBP Filadelfia belum memiliki IMB Rumah Ibadah, tetapi jika Putusan tersebut tidak dieksekusi Bupati Bekasi akan berpotensi melanggar hukum dan undang-undang; maka, terhadap buntutnya proses penyelesaian sengketa tersebut, sebaiknya pihak Bupati Bekasi dan pihak Gereja HKBP Filadelfia melakukan kompromi untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan pendekatan kasus mencapai tujuan "*win-win solution*", yakni penyelesaian yang mendatangkan kebaikan dan keadilan untuk semua pihak.

- H. Daftar Acuan : Buku + Undang-Undang + Peraturan Pemerintah + Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
I. Dosen Pembimbing I : I Dewa Ayu Widyaningsih, SH., MH
Doasen Pembimbing II : Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH

Penulis

(David Parlindungan Hutahaeen)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH
DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Putu Ayu Yuliari Fajar Satyawati

NPM : 1440050068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2018

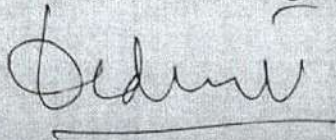
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SIDANG PENULISAN HUKUM

Nama : Putu Ayu Yuliari Fajar Satyawati
Nim : 1440050068
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM
PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

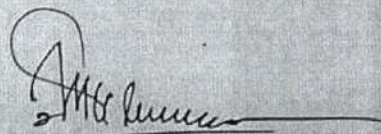
Disetujui,

Dosen Pembimbing I



(I Dewa Ayu Widyani, SH.,MH)

Dosen Pembimbing II



(Dr. Aartje Tehupeiori, SH.,MH.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan
Hukum Administrasi Negara



(I Dewa Ayu Widyani, SH.,MH)

**ANALISIS HUKUM TENTANG RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN
KREDIT DI BANK MANDIRI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1) pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

NAMA : Bunga Siti Aisyah Husni
NIM : 15.400.500.73
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2019

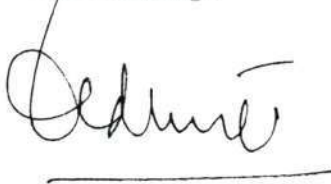
**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG
PESERTA UJIAN**

NAMA : Bunga Siti Aisyah Husni
NIM : 15.400.500.73
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

**ANALISIS HUKUM TENTANG RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN
KREDIT DI BANK MANDIRI**

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



(I Dewa Ayu Widyani, S.H., MH)

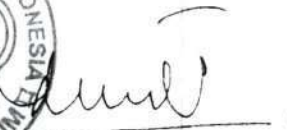
Pembimbing II



(Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H)

Kepala Bagian Program Kekhususan

Hukum Administrasi Negara



(I Dewa Ayu Widyani, SH., MH.)

- A. Name : Bunga Siti Aisyah Husni
- B. student's numbers : 15.400.500.73
- C. Title : LEGAL ANALYSIS ABOUT FLAT HOUSE AS CREDIT GUARANTEE IN MANDIRI BANK
- D. supervisor : 1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., MH
2. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H
- E. Specialty Program : State Administrative Law
- F. Reading list : Books, Journals, Internet, Constitution
- G. Number of pages : xi + 99 page
- H. Keywords : Flats, Credit Guarantee
- I. Summary of Contents :

ABSTRACT

Credit guarantees are very important in a credit agreement. Credit guarantees that use the apartment unit rights as a specific form that needs to be made in two agreements, namely a credit agreement as the main agreement and the Deed of Granting the Right as an agreement agreement. Through these two agreements, it can provide legal protection for Bank Mandiri as the lender and the owner of the apartment unit rights as the recipient of credit.

Writing this to understand the procedure of Flats as a guarantee of credit at Bank Mandiri and legal protection for holders of Flats that make the Flats as collateral at Bank Mandiri.

In writing this thesis, the author uses normative research methods, while the type of data used by the author is secondary data (literature) and primary data (through data) Bank Mandiri credit as a creditor must be careful because the Deed of giving the right to the mortgage can be made several credit guarantees so that they must be well researched, especially when conducting credit analysis involving collateral in the form of apartment units. Then this legal protection must be maintained so that the funds issued for guaranteed credit can be paid and the guarantee of the apartment units that are bound by credit cannot be transferred to other parties.

Jakarta, February 14, 2019
Author

Bunga Siti Aisyah Husni

- A. Nama : Bunga Siti Aisyah Husni
 B. NIM : 15.400.500.73
 C. Judul : ANALISIS HUKUM TENTANG RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK MANDIRI
 D. Dosen Pembimbing : 1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., MH
 2. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H
 E. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
 F. Daftar Bacaan : Buku, Jurnal, Internet, Undang-Undang
 G. Jumlah Halaman : xi + 99 halaman
 H. Kata kunci : Rumah Susun, Jaminan Kredit
 I. Ringkasan Isi :

ABSTRAK

Jaminan kredit sangat penting dalam perjanjian kredit. Jaminan kredit yang menggunakan hak satuan rumah susun sebagai bentuk spesifik yang perlu dibuat dalam dua perjanjian yakni perjanjian kredit sebagai perjanjian utama dan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai perjanjian asosioir. Melalui dua perjanjian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi Bank Mandiri sebagai pemberi kredit dan pemilik hak satuan rumah susun sebagai penerima kredit.

Penulisan skripsi ini untuk memahami tata cara Rumah Susun sebagai jaminan kredit di Bank Mandiri dan perlindungan hukum bagi pemegang Rumah Susun yang menjadikan Rumah Susun nya sebagai jaminan di Bank Mandiri.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder (kepuustakaan) dan data primier (melalui data) Pemberian kredit Bank Mandiri sebagai kreditur harus berhati-hati karena Akta pemberian hak tanggungan dapat dijadikan beberapa jaminan kredit sehingga harus diteliti dengan baik, khususnya ketika melakukan analisis kredit yang menyangkut colateral berbentuk hak satuan rumah susun. Kemudian Perlindungan hukum ini harus dipertahankan agar dana yang dikeluarkan untuk kredit terjamin dapat dibayar dan jaminan satuan rumah susun yang terikat dengan kredit tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain.

Jakarta, 14 Februari 2019
 Penulis

Bunga Siti Aisyah Husni